

Pengaruh Penerapan Fair Value dan Basis Akruwal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintahan di Wilayah IV Jawa Barat)

¹Naila Irfania, ²Sri Fadilah, ³Nurhayati

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹nailairfania@yahoo.com, ²srifadilah71@gmail.com, ³nurhayati_kanom@yahoo.com

Abstrak. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan harus berkualitas. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penerapan *fair value* dan basis akrual diyakini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena pengukuran *fair value* akan mempengaruhi keandalan dan relevansi informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dan akuntansi berbasis akrual akan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *fair value* dan basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Untuk kegunaan penelitian tersebut, penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan kepada pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *fair value* dan basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Fair Value*, Basis Akruwal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tahun 2015 adalah tahun yang sangat krusial dalam bidang pelaporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, karena pada tahun 2015 terjadi perubahan basis akuntansi pada pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota, dari yang sebelumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual basis) menjadi sistem akuntansi berbasis akrual (accrual basis). Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif, lebih transparan, dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan sehingga para pengguna dapat mengukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya (Ali, 2015).

Namun pada kenyataannya, tidak semua laporan keuangan yang dihasilkan baik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah merampungkan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menemukan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah dengan banyak ditemukan terkait laporan keuangan daerah yang belum mencapai Wajar Tanpa Pengecualian. Contohnya saja LKPD di Wilayah IV Jawa Barat. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015, dari 60 LKPD yang diterbitkan selama tahun anggaran 2009 sampai dengan 2014, hanya terdapat 9 LKPD yang mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sisanya, sebanyak 47 LKPD dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 4 LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Penyebab dari permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah ini diduga disebabkan oleh penerapan basis akrual yang masih bermasalah akibat

terkendala regulasi dan ketidaksiapan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual di daerahnya (Azis, 2015).

Disamping penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, International Financial Reporting Standards (IFRS) pun mulai diadopsi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mematuhi IFRS sepenuhnya dengan batas waktu yang ditetapkan bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah untuk menggunakan IFRS adalah 1 Januari 2012. Dengan diadopsinya IFRS, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan namun perubahan tersebut akan memberikan dampak tertentu. Salah satu hal utama dalam konvergensi IFRS adalah penggunaan pendekatan pengukuran dan penilaian nilai wajar (*fair value*) (Rosandi, 2012).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis meneliti tentang bagaimana pengaruh penerapan *fair value* dan basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Perumusan/Identifikasi Masalah dan Tujuan Penelitian

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *fair value* dan basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan/identifikasi masalah tersebut.

B. Kajian Pustaka/Landasan Teori

Definisi *fair value* (nilai wajar) menurut Penman (2007:33) adalah harga yang akan diterima dengan menjual satu aset atau yang dibayar untuk memindahkan suatu kewajiban dalam transaksi antara peserta-peserta pasar di tanggal pengukuran. PSAK No. 68 menyatakan bahwa hirarki nilai wajar ditetapkan untuk mengukur nilai wajar, sebagai berikut: (Level 1) harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran, (Level 2) input lain yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung, dan (Level 3) harga yang dapat diobservasi dalam (Level 1) dan (Level 2) tidak tersedia, maka menggunakan teknik penilaian lain, seperti pendekatan pasar, pendekatan penghasilan, dan pendekatan biaya.

Abdul Halim (2007:49) menyatakan bahwa basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Dalam basis akrual, aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapat tersebut. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas negara/daerah. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Munawir (2010:31) mendefinisikan laporan keuangan sebagai alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan posisi keuangan dalam hasil-hasil

yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pemakai, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

C. Metodologi Penelitian/Metode dan Sasaran Penelitian

Dalam suatu penelitian akan membutuhkan suatu metode penelitian yang sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Pada penelitian kali ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode survey dengan teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan *fair value*, penerapan basis akruaI dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan lokasi penelitian dilakukan pada pemerintah daerah yang berada di wilayah IV Jawa Barat. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang didalamnya terdapat pernyataan yang berkaitan dengan penerapan *fair value*, penerapan basis akruaI dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara simultan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh koefisien korelasi berganda antara penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara simultan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel 4.1 Korelasi Berganda Antara Penerapan *Fair Value* dan Penerapan Basis AkruaI Secara Simultan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,872 ^a	0,761	0,692	0,24046

a. Predictors: (Constant), Basis AkruaI, Fair Value

b. Dependent Variable: Kualitas LK

Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) antara penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara simultan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,872. Data ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat/sangat kuat antara penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara simultan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Guna mengetahui bentuk hubungan fungsional penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah digunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 20 for windows, diperoleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,562	0,629		-0,893	0,401
	Fair Value	0,660	0,260	0,525	2,533	0,039
	Basis Akreal	0,618	0,257	0,499	2,406	0,047

a. Dependent Variable: Kualitas LK

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti disajikan pada tabel 4.2 maka dapat dibentuk persamaan regresi variabel penerapan fair value dan penerapan basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut.

$$\hat{Y} = -0,562 + 0,660 X_1 + 0,618 X_2$$

Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi penerapan *fair value* (X_1) memiliki tanda positif yang berarti semakin baik penerapan *fair value* akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian koefisien regresi penerapan basis akrual (X_2) juga memiliki tanda positif yang berarti semakin baik penerapan basis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Koefisien Determinasi

Setelah diuji dan terbukti bahwa penerapan *fair value* dan penerapan basis akrual secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya akan dihitung seberapa besar pengaruh penerapan *fair value* dan penerapan basis akrual secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh melalui hasil pengolahan menggunakan software SPSS 20 for windows disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,872 ^a	0,761	0,692	0,24046

a. Predictors: (Constant), Basis Akreal, Fair Value

b. Dependent Variable: Kualitas LK

Pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) penerapan fair value dan penerapan basis akrual secara simultan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,872. Selain koefisien korelasi, pada tabel diatas juga disajikan nilai R-square (0,761) yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD) dihitung dari mengkuadratkan koefisien korelasi:

$$KD = (0,872)^2 \times 100\% = 76,1\%$$

Koefisien determinasi sebesar 76,1% menunjukkan bahwa 76,1% perubahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat dapat dijelaskan oleh penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara simultan. Dengan kata lain penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara simultan memberikan pengaruh sebesar 76,1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 23,9% merupakan pengaruh faktor lain di luar variabel penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI, seperti sistem pengendalian internal, pemahaman penyusun laporan keuangan mengenai basis akruaI, dan lain-lain.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat. Penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara simultan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *fair value* dan semakin baik penerapan basis akruaI akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat.

Selain itu, baik *fair value* maupun basis akruaI dinilai lebih transparan karena menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Sehingga diharapkan dengan semakin baiknya penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan juga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama penerapan *fair value* dan basis akruaI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat. Penerapan *fair value* dan penerapan basis akruaI secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh yang sangat kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah IV Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- Ali, Pahmil. 2015. "Penerapan Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Pemerintah" dalam <http://bdkmedan.kemenag.go.id/> diunduh tanggal 06 November 2015.
- Azis, Harry Abdul. 2015. "Pemerintah Harus Bereskan Tujuh Masalah Keuangan" dalam <http://skalanews.com/berita/nasional/umum/201191-pemerintah-harus-bereskan-tujuh-masalah-keuangan-->, diunduh tanggal 06 November 2015.

- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 (BPK RI)
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 (BPK RI)
- Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty
- Penman, Stephen H. 2007. Accounting and Business Research Special Issues: Financial Reporting Quality: is Fair Value a Plus or a Minus.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
- PSAK Nomor 68 Tahun 2013
- Rosandi, Remirda Eva. 2012. Efektivitas Penggunaan Fair Value (Nilai Wajar) Sebagai Dasar Pengukuran Aset. e-journal. Jember: Universitas Jember

